

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI 2014

OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
 - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 1.2 Pengurangan Pengangguran
 - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
 - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
 - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
 - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
 - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
 - 3.1 Menguatnya Sektor Pertanian Primer
 - 3.2 Kualitas Pekerjaan Yang Tersedia Masih Rendah
 - 3.3 Pertumbuhan Daerah Lebih Didorong Oleh Konsumsi Daripada Investasi
 - 3.4 Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah Terbatas
 - 3.5 Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 3.6 Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
 - 3.7 Kualitas Belanja Pemerintah Belum Mendukung Kinerja Perekonomian
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
 - 5.1 Isu Strategis Daerah
 - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

Perkembangan Pembangunan Provinsi Jambi 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Perkembangan Indikator Kinerja Utama

1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama periode 2006-2013 kinerja perekonomian Provinsi Jambi relatif baik. Perekonomian daerah tumbuh dengan laju rata-rata 7,18 persen per tahun, di atas laju pertumbuhan rata-rata nasional sebesar 5,90 persen per tahun pada periode yang sama (Gambar 1). Dalam perekonomian wilayah Sumatera, Jambi berkontribusi sebesar 4,5 persen pada tahun 2012. Secara nasional, peran Jambi relatif masih kecil, namun meningkat dari 0,8 persen pada tahun 2005 menjadi 1 persen pada tahun 2010 dan meningkat kembali sebesar 1,08 pada tahun 2012. Komoditas unggulan Provinsi Jambi dalam bidang pertanian antara lain karet, kelapa sawit, dan kelapa.



Sumber: BPS, 2013

Meskipun laju pertumbuhan ekonomi daerah di atas laju nasional, namun secara per kapita laju pertumbuhannya masih di bawah nasional karena laju pertumbuhan penduduk Jambi yang relatif pesat. Karena tingginya laju pertumbuhan penduduk ini maka pertumbuhan perekonomian belum mampu memperkecil gap (kesenjangan) PDRB per kapita antara Jambi dan rata-rata nasional (PDB per kapita). Jika pada tahun 2006 rasio PDRB per kapita antara Jambi dan rata-rata nasional adalah 62,38 persen maka pada tahun 2012 rasionya meningkat menjadi 66,39 persen

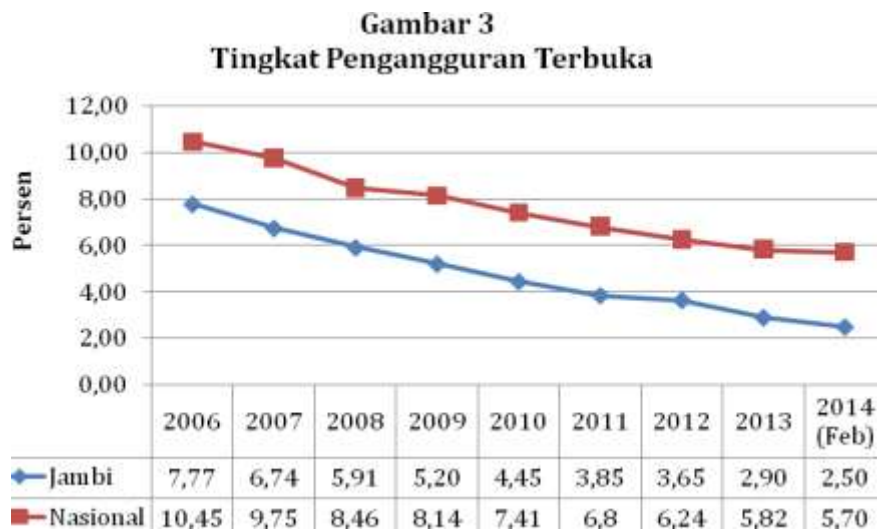
(Gambar 2). Hal ini berarti secara per kapita, perekonomian Jambi bertumbuh relatif cepat dibandingkan rata-rata provinsi lain.



Sumber: BPS, 2013

2. Pengurangan Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi daerah disertai dengan penciptaan lapangan kerja yang secara konsisten menurunkan tingkat pengangguran di daerah. Dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional, tingkat pengangguran terbuka di Jambi relatif rendah dengan laju penurunan yang konstan menurun (Gambar 3). Hal ini mengindikasikan minimnya dampak peningkatan harga bahan bakar minyak pada lapangan kerja di Jambi. Meskipun tampaknya baik, namun kinerja perekonomian daerah dalam penciptaan lapangan kerja ini masih perlu ditelaah dari sisi kualitas dan produktivitasnya.

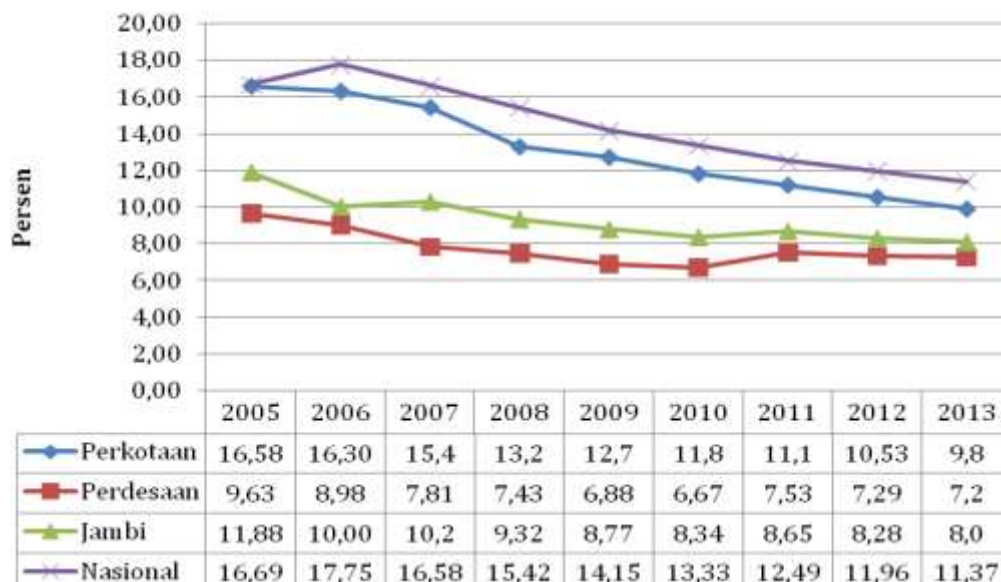


Sumber: BPS, 2014

3. Pengurangan Kemiskinan

Kondisi perekonomian yang membaik juga membawa dampak positif dalam penurunan tingkat kemiskinan. Selama periode 2006-2013 kemiskinan di Provinsi Jambi berkurang sebanyak 1,93 persen (Gambar 4). Kemiskinan di perkotaan Jambi lebih besar daripada di pedesaan. Ada beberapa kemungkinan yang menjelaskan hal ini. Hal ini menandakan belum berkembangnya lapangan kerja non pertanian di perkotaan, atau kondisi yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk di perkotaan dan daerah sekitar perkotaan yang relatif pesat. Jika pertumbuhan penduduk ini bersumber dari migrasi, maka kemungkinan berikutnya adalah tidak selarasnya antara ketrampilan kerja para migran dan tingginya kompetisi memperebutkan lapangan kerja yang terbatas di perkotaan.

Gambar 4
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS, 2013

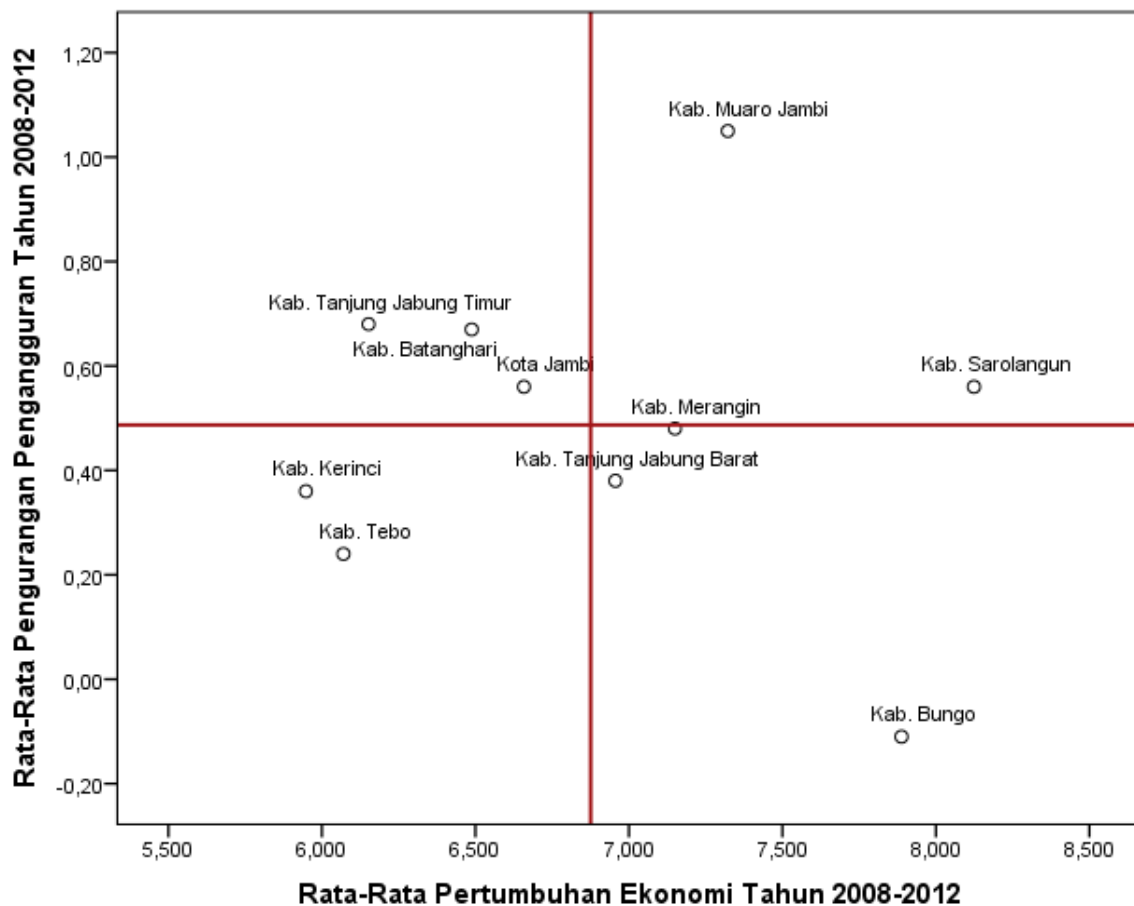
B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seringkali dipahami sebagai peningkatan nilai tambah yang diikuti oleh perluasan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Persebaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut (Gambar 5).

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan
Jumlah Pengangguran 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Pertama, Kabupaten Muaro Jambi, Merangin, dan Sorolangun termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Kedua, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi, dan Kabupaten Batanghari yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

Ketiga, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Tebo terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah

harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Keempat, Kabupaten Bungo dan Tanjung Jabung Barat terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

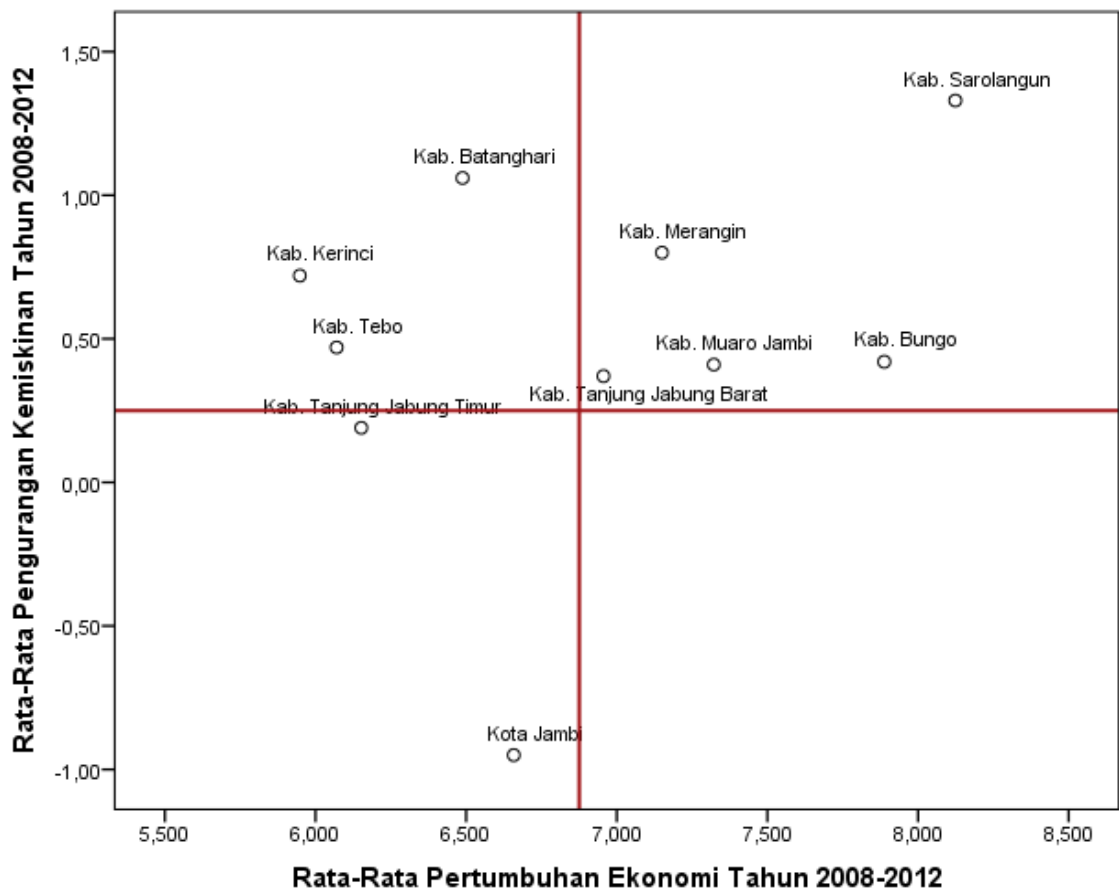
2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 6 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan selama tahun 2008-2012 dengan penjelasan sebagai berikut. *Pertama*, Kabupaten Merangin, Sorolangun, Muaro Jambi, Bungo, dan Tanjung Jabung Barat termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

Kedua, Kabupaten Kerinci, Batanghari, dan Tebo terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

Ketiga, kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan. *Keempat*, tidak ada daerah yang terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*).

Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

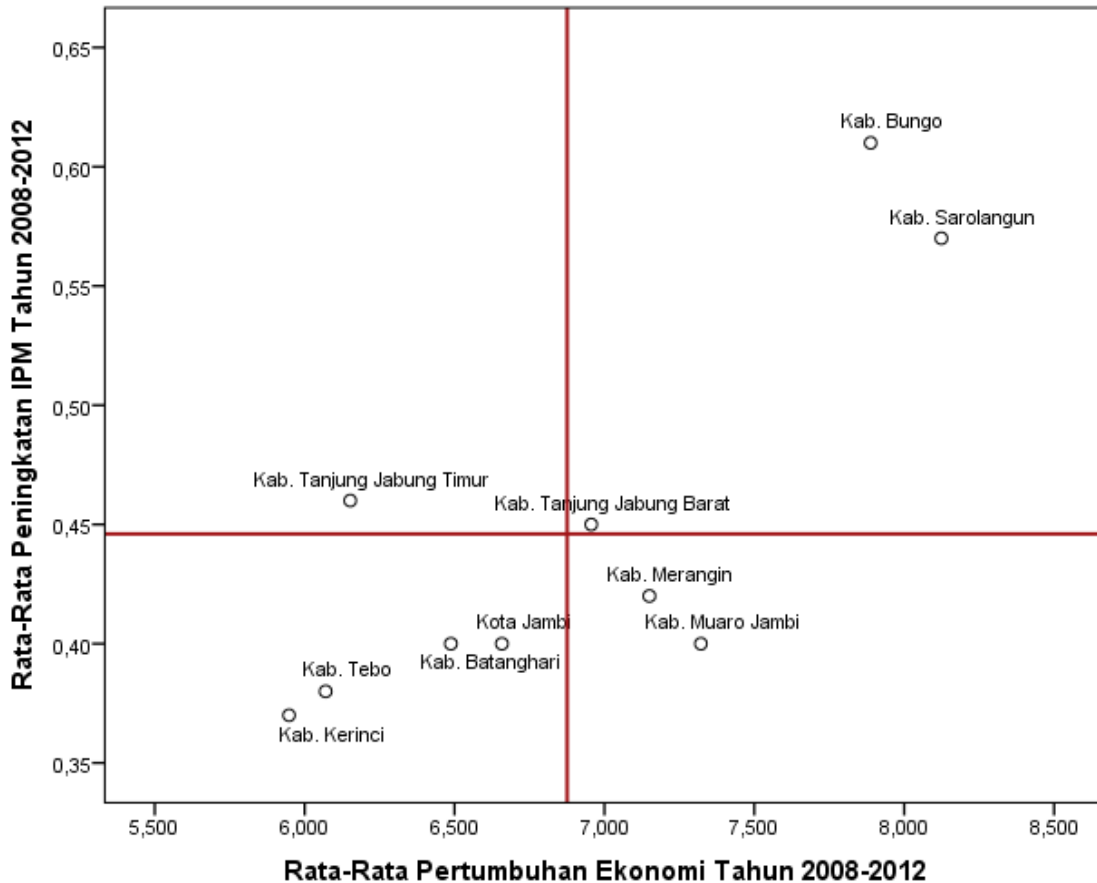
3. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Jambi menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut (Gambar 7). *Pertama*, Kabupaten Bungo, Sorolangun, dan Tanjung Jabung Barat termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus

diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

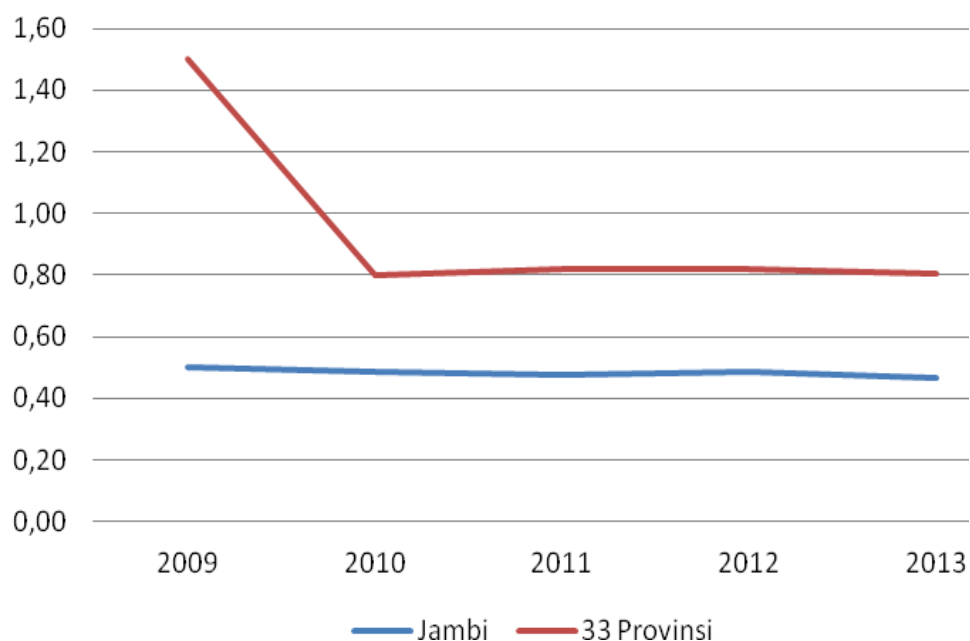
Ketiga, Kabupaten Batanghari, Kerinci, Tebo, dan Kota Jambi terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

Keempat, Kabupaten Merangin dan Muaro Jambi terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Jambi yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2009-2013 cukup tinggi. Kesenjangan ekonomi di Provinsi Jambi masih berada di bawah nasional dengan kecenderungan semakin meningkat.

Gambar 8
Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) Provinsi Jambi Tahun 2009-2013



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Tabel 1
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2007-2012 (000/jiwa)

Kab/ Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kerinci	9.920	11.454	11.604	13.317	14.953	17.093
Merangin	6.193	7.143	8.456	9.706	11.297	12.904
Sarolangun	11.133	11.529	13.536	15.313	18.489	20.696
Batang Hari	10.183	12.372	13.556	16.009	19.005	21.110
Muaro Jambi	8.123	9.687	10.547	12.003	13.723	15.121
Tanjung Jabung Timur	23.498	31.594	37.782	43.796	49.389	56.654
Tanjung Jabung Barat	15.425	19.373	20.762	23.929	27.468	30.640
Tebo	5.912	6.925	7.536	8.747	10.140	11.274
Bungo	8.030	10.253	11.304	13.239	15.303	17.003
Kota Jambi	11.642	13.582	15.025	17.049	19.381	22.178
Kota Sungai Penuh	-	-	15.740	18.350	20.600	23.613
JAMBI	11.151	13.922	14.597	17.332	19.987	22.405

Sumber: BPS, 2013

Kesenjangan ekonomi di Jambi dikarenakan masih terbatasnya jangkauan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Tantangan yang harus dihadapi adalah meningkatkan, pemeratakan, dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya, serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah.

Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Jambi terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki PDRB per kapita tertinggi di Jambi selama periode 2007-2012. Ketersediaan infrastruktur turut mendukung tingginya PDRB perkapita di daerah ini.

C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

1. Menguatnya Sektor Pertanian Primer

Peran sektor pertanian baik dalam perekonomian daerah sangat penting. Pertanian memberi sumbangan terbesar dalam pembentukan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor pertanian juga merupakan sumber pertumbuhan terbesar. Oleh karenanya kinerja pertumbuhan daerah mirip dengan kinerja pertumbuhan sektor pertanian. Namun demikian sektor-sektor yang bertumbuh paling pesat adalah keuangan, diikuti listrik, gas, dan air bersih serta konstruksi. Struktur perekonomian Jambi tahun 2013 didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan pertambangan (Tabel 2). Sektor industri pengolahan di Jambi juga semakin meningkat kontribusinya terhadap perekonomian Jambi, namun sektor pendukung industrialisasi masih di bawah 1 persen

Tabel 2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	29,69	29,34
2.	Pertambangan	15,98	12,54
3.	Industri Pengolahan	10,68	12,18
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0,96	0,86
5.	Konstruksi	5,70	5,67
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	16,98	18,76
7.	Angkutan, Telekomunikasi	6,31	7,27
8.	Keuangan	5,21	5,76
9.	Jasa-jasa	8,49	7,62
		100,00	100,00

Sumber: BPS, 2013

Jika ditelusuri lebih jauh, sektor-sektor basis daerah sebagian besar adalah komoditas primer, di antaranya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, minyak dan gas bumi, dan galian. Industri pengolahan yang relatif

berkembang adalah industri barang kayu dan hasil hutan lainnya. Kesemua sektor ini memiliki nilai *Location Quotient (LQ)* di atas satu yang mengindikasikan keunggulan komparatif daerah dibandingkan daerah-daerah lain (Tabel 3).

Tabel 3
Nilai *LQ* Sektor Perekonomian Jambi 2008-2012

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	2,24	2,26	2,29	2,30	2,35
a. Tanaman Bahan Makanan	1,66	1,66	1,68	1,69	1,75
b. Tanaman Perkebunan	6,68	6,96	7,11	7,18	7,24
c. Peternakan	1,18	1,19	1,20	1,20	1,20
d. Kehutanan	2,23	2,10	1,99	1,92	2,01
e. Perikanan	0,55	0,56	0,55	0,53	0,51
2. Pertambangan dan Penggalian	1,46	1,39	1,52	1,81	1,81
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	2,07	2,09	2,30	2,82	2,82
b. Pertambangan Bukan Migas	0,53	0,41	0,52	0,64	0,78
c. Penggalian	1,23	1,22	1,25	1,23	1,22
3. Industri Pengolahan	0,50	0,50	0,50	0,48	0,49
a. Industri Migas	0,38	0,32	0,36	0,36	0,40
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,87	0,72	0,79	0,79	0,86
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	0,51	0,52	0,51	0,49	0,49
4. Listrik, Gas & Air Bersih	1,07	1,01	1,07	1,11	1,11
a. Listrik	1,40	1,40	1,51	1,54	1,50
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	1,18	1,18	1,16	1,10	1,17
5. Konstruksi	0,75	0,75	0,74	0,73	0,78
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	0,96	1,00	1,01	0,99	1,00
a. Perdagangan Besar dan Eceran	1,05	1,12	1,12	1,10	1,10
b. Hotel	0,40	0,39	0,42	0,42	0,42
c. Restoran	0,54	0,50	0,50	0,50	0,51
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,98	0,88	0,80	0,74	0,71
a. Pengangkutan	1,99	1,94	1,86	1,76	1,76
1). Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Angkutan Jalan Raya	2,99	2,92	2,82	2,67	2,65
3). Angkutan Laut	2,33	2,37	2,42	2,38	2,37
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	3,41	3,25	3,04	2,95	2,81
5). Angkutan Udara	1,01	1,05	0,99	0,93	0,97
6). Jasa Penunjang Angkutan	0,54	0,52	0,50	0,49	0,49
b. Komunikasi	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	0,52	0,57	0,60	0,60	0,60
a. Bank	0,55	0,70	0,78	0,80	0,80
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,40	0,47	0,44	0,48	0,45
d. Real Estat	0,78	0,78	0,78	0,76	0,74
e. Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
9. Jasa-jasa	0,95	0,93	0,90	0,86	0,84
a. Pemerintahan Umum	1,79	1,78	1,75	1,70	1,71
b. Swasta	0,29	0,28	0,27	0,25	0,24
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,73	0,70	0,69	0,65	0,63
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,23	0,21	0,19	0,19	0,17
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11

LQ dihitung dengan menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Pertumbuhan sektor primer mendominasi perekonomian Jambi. Dalam hal ini perlu diperhatikan dua hal. Pertama, ekspansi perkebunan dan usaha kehutanan perlu diimbangi dengan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan yang ketat. Beberapa risiko pembukaan lahan yang perlu diperhatikan adalah penurunan keragaman hayati akibat konversi hutan menjadi lahan monokultur, efek negatif pelepasan (emisi) karbon, dan potensi konflik pertanahan dengan masyarakat adat. Kedua, perkembangan pesat sektor pertanian, khususnya perkebunan, tampaknya telah menyedot tenaga kerja di sektor industri pengolahan.

Dalam kurun waktu 2010-2014 sektor pertanian, perdagangan, dan jasa-jasa menyerap tenaga kerja paling banyak (Tabel 4). Ke depan, sektor industri pengolahan masih perlu dikembangkan lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor pertanian dan jasa-jasa yang kurang produktif.

Tabel 4
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014

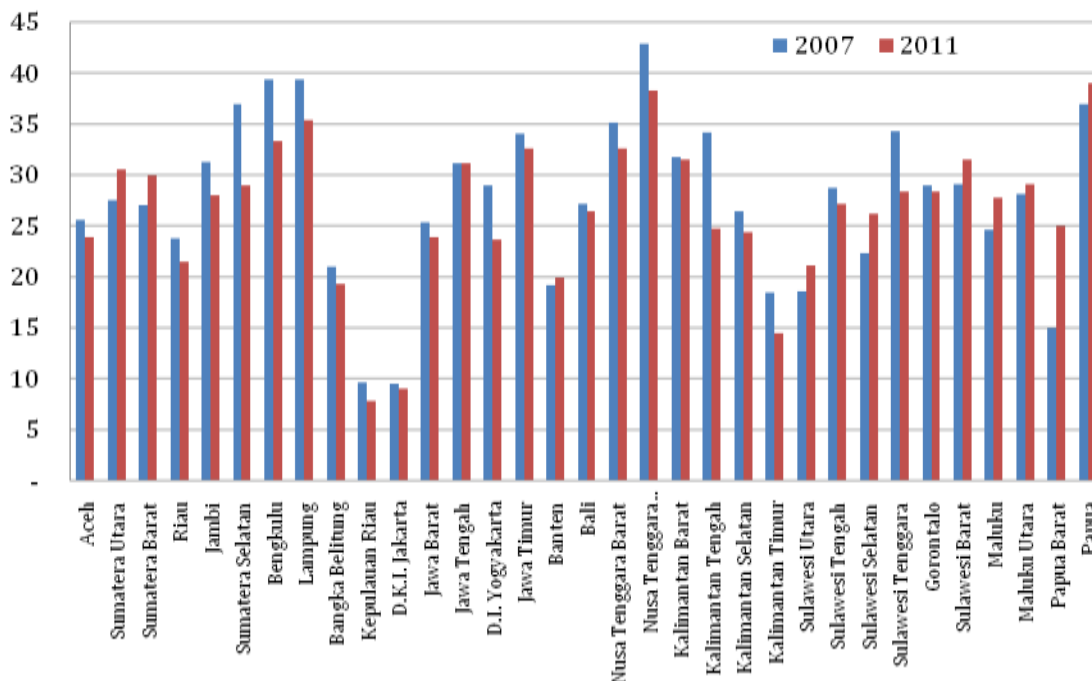
No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014	Perubahan
1	Pertanian	670.841	755.612	84.771
2	Pertambangan	22.727	25.634	2.907
3	Industri Pengolahan	34.821	43.971	9.150
4	Listrik, Gas, Air	5.268	0	-5.268
5	Bangunan	46.063	54.251	8.188
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	211.946	287.247	75.301
7	Angkutan & Telekomunikasi	63.675	54.535	-9.140
8	Keuangan	13.526	37.300	23.774
9	Jasa-Jasa	221.839	272.514	50.675
	Total	1.290.706	1.531.064	240.358

Sumber: BPS, 2014

2. Kualitas Pekerjaan Yang Tersedia Masih Rendah

Ketergantungan yang tinggi pada sektor primer juga berakibat pada rendahnya kualitas lapangan pekerjaan yang tercipta. Hal ini tampak pada tingginya porsi pekerja dengan status pekerjaan utama pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian, dan pekerja tidak dibayar (Gambar 9). Kondisi yang dihadapi para pekerja pada kategori ini relatif buruh mengingat rendahnya upah, tingginya ketidakpastian (kadang bekerja kadang tidak), dan tidak adanya perlindungan ketenagakerjaan karena umumnya beraktivitas di sektor informal. Meskipun porsi pekerjaan kurang berkualitas ini cenderung menurun di Jambi, namun pada tahun 2011 masih relatif tinggi dibandingkan daerah-daerah lain di wilayah Sumatera. Di samping itu, Provinsi Jambi juga masih menghadapi masalah tingginya setengah pengangguran. Hal ini tampak dari tingginya porsi pekerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Pada tahun 2011 porsi setengah penganggur di Jambi mencapai 42 persen dari total orang yang bekerja, atau yang tertinggi di wilayah Sumatera (bersama Aceh). Angka ini jauh di atas angka nasional 32 persen.

Gambar 9
Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas



Sumber : BPS, 2011

3. Pertumbuhan Daerah Lebih Didorong oleh Konsumsi daripada Investasi

Jika PDRB dilihat dari sisi penggunaan, maka sumber pertumbuhan utama daerah adalah konsumsi masyarakat dan ekspor. Konsumsi masyarakat berkontribusi sebesar 55 persen dalam total PDRB Tahun 2013 (Tabel 5). Pertumbuhan yang didorong oleh konsumsi memiliki keterbatasan, yakni tidak berkelanjutan. Dalam jangka menengah pertumbuhan berbasis konsumsi akan menggerus tabungan

masyarakat, dan karena tabungan bisa dikonversi menjadi investasi maka pada tahap selanjutnya pertumbuhan semacam ini dapat mengurangi potensi investasi.

Tabel 5
Struktur PDRB Menurut Penggunaan 2013

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	55,85	64,67
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	0,62	0,66
3.	Konsumsi Pemerintah	16,77	18,26
4.	PMTB	18,53	18,71
5.	Perubahan Stok	2,59	3,26
6.	Ekspor	44,03	63,30
7.	Impor	38,39	68,86
		100,00	100,00

Sumber : BPS, 2013

Secara nasional tingkat investasi daerah jauh di bawah rata-rata. Sebagai perbandingan, rasio PMTB dalam Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sudah hampir mendekati 30 persen, jauh di atas rasio PMTB terhadap PDRB Jambi yang hanya 18 persen. Sumber pertumbuhan penting berikutnya adalah ekspor. Ekspor bertumbuh lebih tinggi dari laju PDRB dan kontribusinya dalam pembentukan output juga besar. Ekspor Provinsi Jambi juga dominan terhadap pembentukan PDRB Jambi sebesar 44 persen

Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang ramah dunia usaha. Salah satu indikatornya adalah kemudahan pelayanan perijinan. Dalam hal ini meski semua kabupaten di Provinsi Jambi telah memiliki Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), namun masih perlu dipastikan bahwa implemetasi PTSP tersebut dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, baik dalam hal biaya maupun waktu yang dibutuhkan.

4. Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah Terbatas

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan sarana transportasi dan ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Secara keseluruhan wilayah Jambi memiliki jaringan jalan sepanjang 936,5 km. Dari segi kuantitas ketersediaan jaringan jalan di Jambi belum cukup. Hal ini terlihat dari indikator kerapatan jalan, yang menunjukkan rasio panjang jalan dalam kilometer terhadap luas wilayah dalam kilometer persegi, dan dinyatakan dalam persen. Angka kerapatan jalan (*road density*) di wilayah ini lebih rendah dari angka nasional (Tabel 6).

Cara lain untuk mengetahui tingkat defisiensi infrastruktur wilayah, adalah dengan menganalisisnya dalam konteks perbandingan dengan daerah dengan tingkat pendapatan per kapita yang sebanding. Hal ini didasari asumsi bahwa terdapat korelasi antara kerapatan jalan dan tingkat pendapatan per kapita di suatu perekonomian. Dengan membandingkan data 33 provinsi di Indonesia, terlihat

hubungan yang positif antara PDB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 10).

Tabel 6
Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012

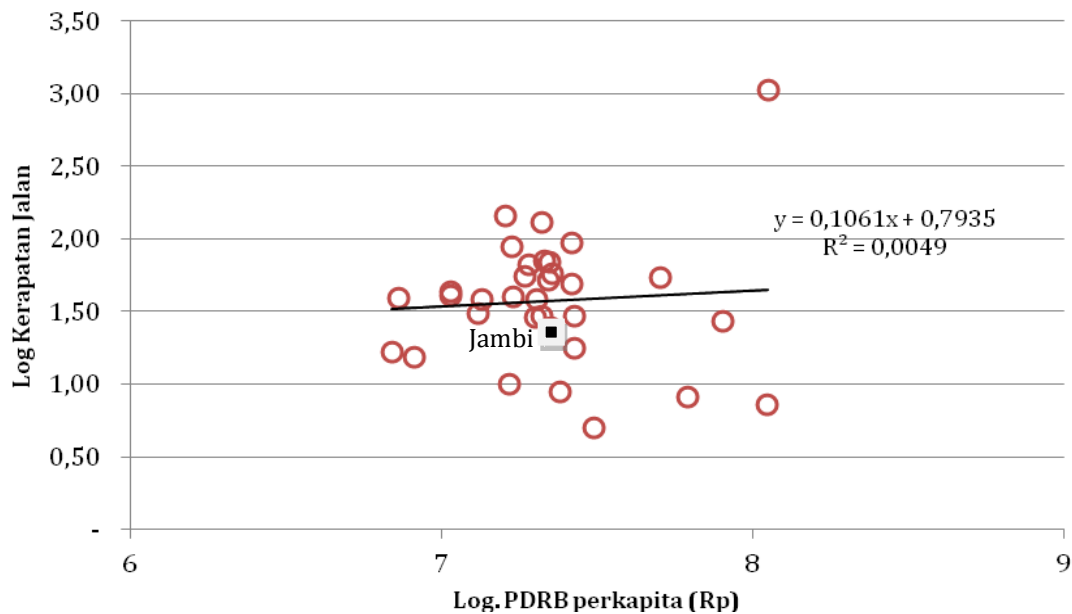
No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
29	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
	Indonesia	33.531	25,99

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu perekonomian, maka kerapatan jalannya cenderung semakin tinggi pula. Provinsi-provinsi yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi Jambi berada di bawah kurva linier, yang menunjukkan ketersediaan jalan di Jambi belum cukup apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia

Kondisi jalan secara kualitas di Jambi baru sekitar separuh panjang jalan yang telah beraspal. Daya dukung jalan bagi perekonomian wilayah tentu berbeda menurut jenis permukaannya. Tingginya tingkat kerusakan jalan perlu mendapat perhatian khusus mengingat dampaknya dalam perekonomian. Jalan yang buruk akan meningkatkan waktu tempuh distribusi barang, mempercepat kerusakan kendaraan, dan meningkatkan ketidakpastian sistem logistik, yang semuanya akan berujung pada perekonomian biaya tinggi. Tantangan yang dihadapi adalah peningkatan kualitas jalan dengan memperhatikan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Gambar 10
Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Tabel 7
Jalan Menurut Jenis Permukaan

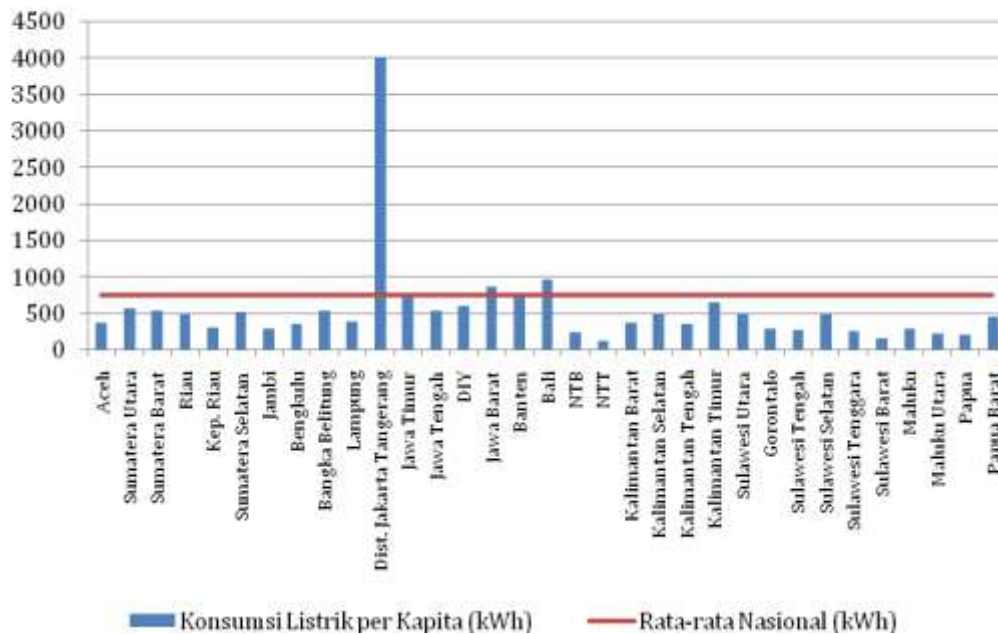
PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN								Total	
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya			
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Jambi	5.319	51	1.957	19	3.168	30	33	0	10.477	100
Sumatera	74.399	50	30.509	20	39.739	27	5.258	4	149.905	100
INDONESIA	258.743	59	72.934	17	91.444	21	14.638	3	437.759	100

Sumber: BPS, 2012

Infrastruktur wilayah lainnya yang sangat penting adalah kelistrikan. Beberapa permasalahan umum yang dihadapi daerah di antaranya adalah kurangnya suplai listrik untuk mendukung perekonomian khususnya pada saat beban puncak. Untuk menggambarkan kondisi kelistrikan di daerah digunakan data konsumsi listrik per kapita. Tingkat konsumsi listrik yang rendah selain menggambarkan kondisi

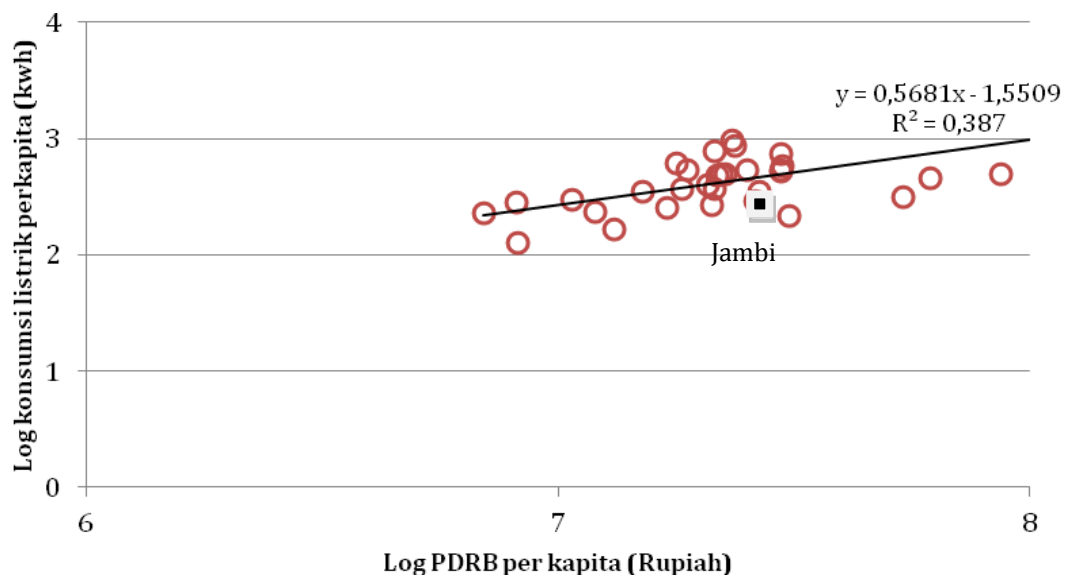
permintaan di suatu daerah juga sekaligus menggambarkan kondisi penyediaan (suplai) listrik karena sifat timbal balik antara keduanya. Dalam hal ini, tingkat konsumsi listrik di Jambi jauh di bawah rata-rata nasional, bahkan merupakan yang terendah di wilayah Sumatera (Gambar 11).

Gambar 11
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013



Sumber: Statistik PLN, 2013

Gambar 12
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013



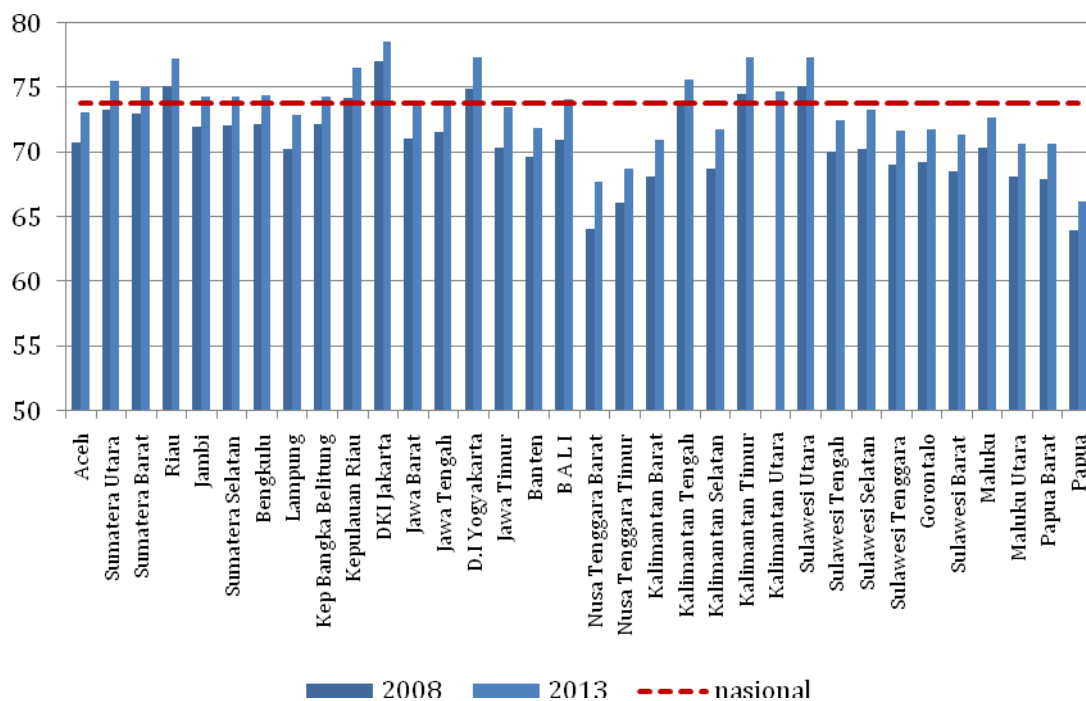
Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) – diolah

Jika dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia, tingkat konsumsi listrik per kapita di Jambi juga menunjukkan defisiensi. Hal ini diperoleh dengan analisis hubungan/keterkaitan antara tingkat konsumsi listrik per kapita dan tingkat pendapatan per kapita (Gambar 12). Tingkat konsumsi dan suplai listrik yang rendah menghambat potensi industrialisasi (kegiatan pengolahan bahan mentah) meskipun di daerah tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya nilai tambah produksi karena produk final hanya berupa komoditas primer.

5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan.

Gambar 13
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013



Sumber: BPS, 2013

Kualitas sumber daya manusia di Jambi yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2013 dibandingkan tahun 2008 dan berada di atas IPM nasional sebesar 73,81 (Gambar 13). IPM Jambi berada pada peringkat 11 secara nasional pada tahun 2013 dengan nilai IPM sebesar 74,35. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari 68,8 tahun pada tahun 2008 menjadi 69,61 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di Jambi meningkat dari 7,63 tahun

pada 2008 menjadi 8,32 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di Jambi pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 96,05 menjadi 96,85 persen, lebih tinggi dari capaian nasional 94,14 persen.

6. Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Perbankan memainkan peranan penting dalam roda perekonomian melalui fungsi intermediasinya. Perbankan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya sebagai pinjaman yang bisa dipakai sebagai modal pengembangan usaha. Potensi simpanan masyarakat di Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat di Jambi relatif untuk dikonversi menjadi investasi. Hal ini terlihat dari rasio nilai investasi (PMTB) terhadap simpanan masyarakat di Bank Umum dan BPR yang lebih kecil dari satu. Namun sebagian besar kredit/pinjaman yang disalurkan adalah untuk keperluan konsumsi, yang terlihat dari rasio pinjaman terhadap simpanan di bank Umum dan BPR yang lebih besar dari satu (Tabel 8). Kondisi ini sekaligus juga menunjukkan bahwa persoalan permodalan usaha lebih pada lemahnya sisi permintaan dari pada penawaran. Penyebabnya bisa karena rendahnya kelayakan usaha, minimnya agunan, atau tingginya risiko usaha di sektor pertanian yang umumnya dihindari perbankan.

Tabel 8
Posisi Simpanan dan Pinjaman pada Bank Umum dan BPR Tahun 2013

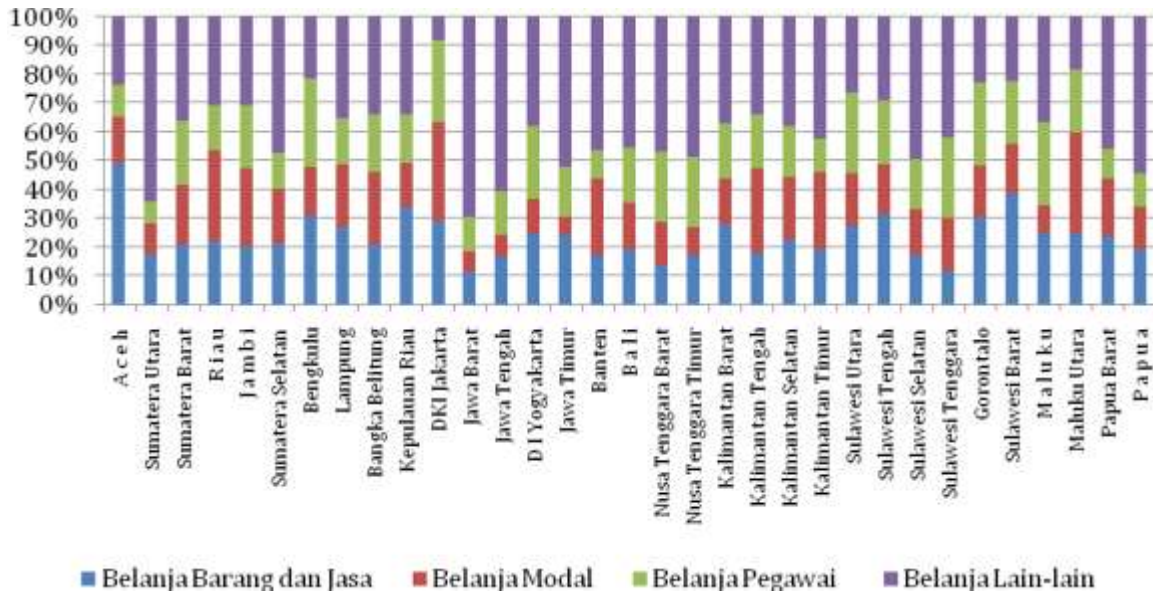
Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
Jambi	19.899	31.404	1,58	0,79
Sumatera	383.923	469.129	1,22	
Nasional	3.575.891	3.322.683	0,92	0,47

Sumber: BPS, 2013

7. Kualitas Belanja Pemerintah Belum Mendukung Kinerja Perekonomian

Berdasarkan data total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2013, porsi belanja modal dalam total belanja APBD di Jambi sebesar 26,99 persen. Sementara itu porsi belanja pegawai, meliputi belanja pegawai dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar 21,95 persen (Gambar 14). Ke depan perlu didorong perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini yang lebih mengarah pada belanja modal. Belanja modal memiliki dampak langsung yang relatif besar kepada perekonomian. Meskipun secara umum porsi investasi pemerintah lebih kecil dibandingkan investasi swasta, namun perannya tidak tergantikan dalam suatu perekonomian. Pembangunan prasarana publik seperti jalan, saluran irigasi, dan jaringan listrik mutlak memerlukan peran pemerintah. Peran investasi pemerintah ini dirasa semakin penting di daerah-daerah yang level investasi swastanya relatif rendah. Investasi pemerintah dalam konteks ini adalah sebagai perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.

Gambar 14
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013



Sumber: BPS, 2013

D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Prospek pertumbuhan ekonomi daerah dalam beberapa tahun ke depan sangat ditentukan oleh: (i) kapasitas para pemangku kepentingan di daerah (pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat) dalam memanfaatkan modal pembangunan yang dimiliki, dan (ii) dinamika lingkungan eksternal yang kondusif. Provinsi Jambi memiliki beberapa modal berharga untuk memacu pertumbuhannya lebih cepat, antara lain perkembangan kualitas sumber daya manusia yang cukup baik, adanya komoditas unggulan daerah dengan pasar yang baik di tingkat nasional dan global, dan posisi geografis yang menguntungkan (relatif dekat dengan pusat pertumbuhan nasional dan regional). Secara teoritis, tingkat pendapatan per kapita dan tingkat investasi yang rendah di Jambi juga memungkinkan terjadinya pertumbuhan yang pesat. Hal ini karena pada daerah dengan stok kapital yang rendah, investasi akan menghasilkan tambahan output (*marginal product of capital*) yang secara proporsional lebih besar.

Dari sisi eksternal, kebijakan nasional untuk mengembangkan ekonomi Sumatera juga sangat kondusif bagi perekonomian daerah. Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah dan investasi swasta di Wilayah Pulau Sumatera pada umumnya berpeluang meningkatkan perekonomian Jambi melalui proses keterkaitan antar-industri baik keterkaitan ke depan maupun ke belakang.

Jika kinerja pembangunan selama lima tahun terakhir dipakai sebagai acuan, maka prospek pencapaian sasaran utama RPJMN 2015-2019 Buku III untuk Provinsi Jambi dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Jambi dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 6,5 – 8,9 persen dapat tercapai. Selama tahun 2014 kinerja ekonomi Jambi mengalami perbaikan. Investasi yang membaik menjadi faktor pendukung perbaikan kinerja ekonomi di Pulau Sumatera. Hal ini juga didukung oleh peningkatan pembangunan proyek pemerintah yang terus berjalan di tahun 2015. Pada tahun 2015 Provinsi Jambi ditopang oleh membaiknya kinerja sektor pertanian, terutama subsektor perkebunan karet. Hasil panen kelapa sawit akan memberikan dampak positif bagi aktivitas industri pengolahan.
2. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 5,9 – 4,2 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi sebesar 8,07 persen, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi Jambi harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 3,87 poin persentase atau 0,65 poin persentase per tahun.
3. Sasaran pengurangan tingkat pengangguran perlu diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan di sektor-sektor non pertanian. Hal ini selain bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah kegiatan ekonomi juga sekaligus untuk mengurangi penumpukan tenaga kerja di sektor pertanian yang mengakibatkan tingkat produktivitas petani yang rendah. Prospek penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor jasa cukup baik mengingat pertumbuhan sektor-sektor tersebut yang diperkirakan tetap tumbuh tinggi. Hal yang perlu dilakukan adalah mendorong penciptaan lapangan kerja di sektor industri pengolahan, baik melalui peningkatan investasi PMA dan PMDN maupun mendorong tumbuhnya wirausaha lokal.

E. Penutup

1. Isu Strategis

Isu-isu strategis pada analisis di atas diidentifikasi dengan mempertimbangkan beberapa kriteria: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada sasaran-sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki. Isu-isu strategis pembangunan Provinsi Jambi meliputi:

- a. Pengembangan industri unggulan daerah
- b. Peningkatan produktivitas pertanian
- c. Peningkatan investasi di daerah
- d. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- f. Peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah

2. Rekomendasi kebijakan

Penanganan isu-isu di atas diperkirakan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu disarankan beberapa kebijakan operasional sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi dalam teknologi pengolahan komoditas unggulan daerah dan teknik pemasaran;
- b. Pemberdayaan petani, pekebun, dan peternak khususnya dalam hal akses permodalan dan penyuluhan teknologi tepat guna;
- c. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- d. Pemantapan kualitas jaringan jalan wilayah;
- e. Peningkatan supli listrik wilayah;
- f. Peningkatan akses pendidikan menengah umum dan kejuruan;
- g. Pengembangan balai latihan kerja dan kewirausahaan;
- h. Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah untuk mempertajam sasaran kegiatan;
- i. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diarahkan pada pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur.

